

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN DENGAN KEKERASAN DAN TIPU
MUSLIHAT**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)

SKRIPSI

Oleh:

Dewi Wahyuni

NIM. C93214076



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Wahyuni
NIM : C93214076
Prodi : Hukum Pidana Islam
Jurusan : Hukum Publik Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)” adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Dewi Wahyuni

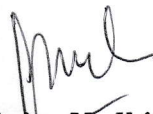
NIM: C93214076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wahyuni NIM : C93214076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing,



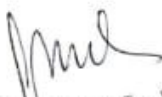
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 1975042003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wahyuni, NIM: C93214076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

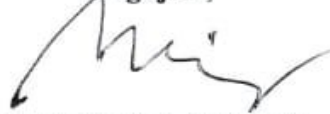
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



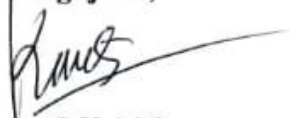
Hj. Nurul Asyia Nadhifah, M.HI.
NIP.197504232003122001

Penguji II,



Dr. Sri Warjiati, S.H, M.H.
NIP.1968082620050120001

Penguji III,



Sukamto, S.H, M.S.
NIP.196003121999031001

Penguji IV,



Lutfi Ansori, S.H, M.H.
NIP. 198311132015031001

Surabaya, 13 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Wahyuni
NIM : C93214076
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : dewi.yuni.dw62@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan

Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.sus/2017/PN.Gsk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Dewi Wahyuni)

C93214076

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Gresik nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perUndang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencabulan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini memaparkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Gresik dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seorang pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan dan tipu muslihat sudah sesuai dengan ketentuan hukuman *tâ'zir* menurut hukum pidana Islam, dimana hukuman *tâ'zir* diserahkan kepada *ijtihad* keputusan *ulil amri* yang dikuasakan kepada hakim dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 14 (empat belas) karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan pasal 81 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pertimbangan hakim pengadilan negeri Gresik dalam memutus perkara bagi pelaku pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat kurang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, seperti halnya pasal yang digunakan adalah pasal mengenai pencabulan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan namun hakim memutus perkara tersebut dengan pasal persetujuan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas *legalitas* dengan yang bertujuan untuk di perolehnya suatu keadilan agar tidak merumuskan suatu perkara yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya seperti rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa*) dan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta*).

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Kajian Pustaka | 10 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 14 |
| G. Definisi Operasional | 14 |
| H. Metode Penelitian | 17 |
| I. Sistematika Penelitian..... | 20 |
| BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT | |
| A. Konsep Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat..... | 22 |
| B. Konsep Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat..... | 26 |

Dalam hal tindak pidana pencabulan terkadang tidak hanya disertai dengan satu perbuatan saja akan tetapi dalam beberapa kasus sering ditemui adanya tindak pidana lain yang menyertai tindak pidana utama tersebut. Melakukan kejahatan satu disertai kejahatan lainnya diatur di dalam pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Dalam tindak pidana pencabulan bisa menggunakan beberapa pasal dari Undang-undang yang berbeda yaitu pada pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, yang bunyi pasalnya;

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

[illegible]

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Serta pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyi pasalnya:

Ayat 1: (Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah

Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵

Akan tetapi pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang tindak pidana khusus pencabulan yang terdapat pada pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena pada Undang-undang tersebut menggunakan *lex specialis* yang mana korban dalam tindak pidana tersebut adalah seorang anak dibawah umur yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-undang tersebut.

Pasal 82

Ayat 1: (Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah

Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan di sertai tipu muslihat bahkan dengan bujukan yang dilakukan oleh seorang pedidik kepada anak dibawah umur yang mana korban adalah murid ajarnya. Pada kasus pencabulan ini pasal yang sesuai adalah pada pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 65 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana itu bisa dikatakan suatu pencabulan apabila memenuhi unsur-unsur

Dalam hukum pidana Islam pencabulan itu sendiri memang tidak ditemukan bagaimana dasar hukum baik dalam nash al-Qur'an maupun al-hadis akan tetapi beberapa dalil menunjukkan bahwa adanya larangan tentang jarimah yang hampir mendekati jarimah pencabulan. Sedangkan jarimah itu sendiri memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan hukumnya oleh Allah, baik dalam sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya. (*Hudud*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya akan tetapi ditentukan oleh penguasa (*ta'zir*)⁶ Jarimah berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana.

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁷

Islam melarang kita untuk mendekati perbuatan zina, dan cabul adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina karena latar belakang perbuatannya sama-sama berasal dari hawa nafsu. Cabul merupakan kejahatan asusila yang melanggar tata norma agama dan sosial. Karena termasuk kejahatan atau jarimah, maka perbuatan cabul dapat dihukum atau dikenai sanksi.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pelaku jarimah pencabulan tidak diterangkan secara pasti, oleh al-Qur'an dan hadis hanya menerangkan mengenai jarimah zina yang hukumannya termasuk dalam hukuman hudud. Hukuman jarimah pencabulan dan jarimah zina jelas berbeda, meskipun jarimah pencabulan dan jarimah zina jarimah yang berasal dari nafsu birahi kelamin, akan tetapi ketika zina yang dimaksud adalah memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sedangkan jarimah pencabulan tidak hanya bertemunya alat kelamin wanita dan alat kelamin pria namun juga ada unsur lain didalamnya seperti, cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada serta memasukkan anggota kelamin pria kedalam mulut wanita, memasukkannya penis dalam

⁷ M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 309.

Begitu juga menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili tidak ada literasi dari beliau yang menjelaskan bagaimana jarimah persetubuhan atau jarimah pencabulan itu dibedakan, namun beliau menuliskan dua hukum yang berbeda mengenai jarimah zina, yakni “*Coitus* atau persetubuhan atau biasa disebut dengan penetrasi anggota kelamin laki-laki kepada anggota kelamin perempuan yang seperti itu harus di hukumi *hadd*”.⁹Dalam halaman yang lain dibuka yang sama, Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan “jika hanya bermain-main diantara kedua paha atau bercumbu rayu saja tidak ada hukuman *hadd* didalamnya, namun bukan berarti tidak ada hukuman baginya, hukuman penguasa atau *ta'zir* adalah sebagai pengganti *hadd*”

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2006), 93.
 hbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011), 303.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011), 303.

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

- [illegible]

1. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Faishol Ghanis, 2017, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)”¹⁰ yang inti dari isinya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 281 Ke-2 KUHP. Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. Putusan tersebut sesuai dalam hal hukuman takzir sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya berdasarkan kewenangan hakim.
2. Skripsi yang ditulis oleh Musahab, 2013. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002”¹¹ yang memuat tentang bagaimana fiqh jinayah memandang pelaku cabul berdasarkan pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002.

¹¹ Musahab, *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002*, (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013).

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus dari pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana persetubuhan sedangkan yang seharusnya pasal yang dijatuhkan oleh hakim adalah pasal mengenai pencabulan karena pencabulanlah yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan. Pencabulan dilakukan oleh terdakwa kepada anak di bawah umur dengan adanya kekerasan disertai tipu muslihat dalam setiap perlakuan terdakwa kepada anak didiknya, dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk. Dalam putusan tersebut, Penulis mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 81

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

[illegible]

1. Untuk mengetahui hukum hakim terhadap putusan nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tentang pencabulan anak dibawah umur dengan kekerasan dan disertai tipu muslihat.
2. Untuk mengetahui tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan disertai tipu muslihat terhadap Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk dalam hukum pidana islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- ## 1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai putusan hakim khususnya yang membahas tentang tindak pidana dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain.

- ## 2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan refrensi yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum demi terciptanya suasana yang menjamin kepastian hukum. Dengan demikian akan tercipta hukum yang berasaskan keadilan.

G. Definisi Operasional

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)”. Dengan harapan supaya tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹³ Moeljatno berpendapat bahwa pengertian perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum

[illegible]

Menurut Undang-undang kata pencabulan atau cabul terdapat dalam pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dalam penjelasannya sebagai berikut, *cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, persetubuhan dsb.¹⁴

4. Persetubuhan

Menurut Undang-undang kata persetubuhan terdapat dalam pasal 284 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dalam penjelasannya sebagai berikut, *persetubuhan* adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri yang biasa

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011), 303.

dijalankan untuk mendapatkan anak hingga keluar air maninya (harus masuk terlebih dahulu antara alat kelamin laki-laki dan perempuan baru bisa disebut dengan persetubuhan).¹⁶

5. Kekerasan

Menurut Undang-undang kata kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dalam penjelasannya sebagai berikut, kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani agar membuat lawan pingsan atau tidak berdaya.¹⁷

6. Tipu Muslihat

Menurut Undang-undang kata tipu muslihat terdapat dalam pasal KUHP 378 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Tipu muslihat yang berasal dari kata tipu atau bohong yaitu membujuk orang lain dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tanpa hak.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁹ Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

¹⁶Ibid., 209.

¹⁷Ibid., 98.

¹⁸Ibid., 261.

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

- | a. Data | tantang | Putusan | Pengadilan | Negeri | No: |
|-------------------------|---------|---------------|------------|---------------------------|---|
| 23/Pid.Sus/2017/PN.Gskt | tentang | tindak pidana | pencabulan | dengan | kekerasan disertai tipu muslihat. |
| b. Ketentuan | tentang | tindak pidana | Pencabulan | dengan kekerasan disertai | tipu muslihat menurut hukum pidana islam. |

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari perUndang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perUndang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan. Sebagai data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan kekerasan melakukan pencabulan disertai dengan tipu muslihat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti kitab karya Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 141.

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[illegible]

karyanya fiqih islam wa adillatuhu. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait pencabulan.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari Pengadilan Negeri Gresik mengenai putusan pengadilan negeri Gresik Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tentang pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan seorang pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan disertai tipu muslihat.

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan dan tipu muslihat yang terdapat didalam putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum khusus nya Hukum Pidana Islam.

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Dalam tindak pidana pencabulan yang digunakan adalah pasal pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana paling lama lima belas tahun, yang bunyi pasalnya:

Ayat 1: (Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah

Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴

[illegible]

perbuatannya sudah memenuhi unsur unsur yang sudah ditentukan oleh pasal yang mengaturnya. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Pada kasus pencabulan pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana bisa dikatakan itu merupakan suatu pencabulan apabila memenuhi unsur unsur:⁵

- 1) Unsur subyektif: dengan sengaja
- 2) Unsur Obyektif:
 - a. Setiap Orang
 - b. Dilarang Melakukan
 - c. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
 - d. Memaksa
 - e. Melakukan Tipu Muslihat
 - f. Melakukn Serangkaian Kebohongan
 - g. Membujuk
 - h. Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

⁵Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 301.

Bahwa telah disebut dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu orang tidak perlu hanya menghendaki, mempunyai maksud atau mengetahui saja melainkan juga jika⁶.

- 1) Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukakan itu mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang undang, walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan timbul. Menurut Prof, tidaklah perlu bahwa merugikan orang lain itu harus merupakan tujuan dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Dengan menunjuk pada bunyinya *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1900, yang bunyinya:

Bij de wetenschap, dat de handeling de schande noodzakelijk o met zeer grote waarschijnlijkheid moest voortvloien, is het verieste opzet aanwezing.

Yang artinya: Kesengajaan itu harus dianggap terbukti, jika pelaku mengetahui baha perbuatanya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar perbuatanya dapat menimbulkan kerugian.

Pasal pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan semua unsur unsur dan juga ancaman pidana maksimal yang akan diberikan.

⁶ Ibid. 305

Menurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki – laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki – laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (syubhat) untuk mencari kenikmatan tertentu.¹¹

Dalam hukum pidana islam tidak mengenal istilah pencabulan, yang dikenal adalah zina. Zina dan pencabulan adalah jarimah yang berbeda, namun cabul termasuk perbuatan maksiat yang mengarah kepada zina. Perbedaannya terletak pada unsur perbuatannya. Unsur zina adalah

- a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah).

¹¹*Ibid.*.69.

- a. Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan
- b. Pencabulan ditandai dengan adanya kontak fisik atau tubuh antara pencabul dan tercabul yang berhubungan dengan kelamin atau syahwat
- c. Pencabulan hanya sebatas kontak fisik, tidak menjurus kepada masuknya kelamin.

- a. Exhibitionism seksual, yaitu sengaja memamerkan alat kelamin.
- b. Voyeurism, yaitu memaksa menciun dengan bernafsu.
- c. Fondling, yaitu mengelus atau meraba alat kelamin.
- d. Fellatio, yaitu orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.¹²

[illegible]

Zina menurut istilah bahasa dan syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan yang subhat kepemilikannya. *Caitus* atau persetubuhan, sebuah tindakan yang sudah dikenal sebagai penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *khasyafa* (kepala penis). Persetubuhan yang mengharuskan dihukumi *hadd* adalah apabila *khasyfa* laki-laki di penitrasikan kedalam lubang kemaluan perempuan. Sehingga jika penetrasi tersebut tidak sampai pada batas ini, seperti apabila hanya bermain-main diantara kedua paha, atau bercumbu rayu saja tidak ada hukuman *hadd* didalamnya melainkan hanya *ta'zir* yang berlaku. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya

[illegible]

Tindakan mempergunakan hak dalam syariat islam seperti kerelaan korban yang hal tersebut bisa menggugurkan hukuman qishah karena berarti didalamnya terkandung unsur subhat, juga seperti seseorang melakukan kejahatan karena dipaksa hal tersebut tidak bisa dikenakan hukuman. Dalam suatu riwayat diceritakan “ seorang wanita dalam keadaan kehausan kemudian dia berpapasan dengan seorang penggembala dan meminta air kepada penggembala tersebut, akan tetapi penggembala tersebut enggan memberikan air minum kecuali dengan syarat perempuan tersebut menyerahkan kehormatannya kepadanya mendengarkan permintaan tersebut si perempuan pun akhirnya menyanggupinya dengan terpaksa” menurut para ulama’ kejadian dalam cerita tersebut tidaklah dapat dihukumi hadd bagi si perempuan karena tidak ada qishas bagi orang yang melakukan pembunuhan karena dipaksa, begitu juga bagi perempuan yang dipaksa melakukan perzinahan, ia tidak boleh dirajam.

- 1) Pelaku adalah orang baligh
- 2) Pelaku adalah orang berakal
- 3) Pelaku adalah orang muslim
- 4) Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa

Berdasarkan hak yang dilanggar, jarimah takzir dibedakan menjadi dua macam, yaitu ¹⁵

1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah Swt yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.
2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

Berdasarkan ketetapanannya, Jarimah takzir dibagi menjadi dua macam, yaitu

- 1) Jarimah takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
- 2) Jarimah takzir yang ditentukan syara, yaitu yang telah dianggap jarimah semenjak diturunkannya syariat Islam hingga akhir zaman.

Kedua jenis jarimah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah jarimah takzir penguasa maupun takzir syara sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. Perbedaannya jarimah takzir penguasa bersifat temporer dan insidental, sedangkan jarimah takzir syara bersifat abadi. Disamping itu, takzir sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim

¹⁵ Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

- [illegible]

Dalam suatu kaidah menjelaskan Dibalik berbagai macam sanksi takzir tersebut terdapat suatu tujuan. Sebenarnya sanksi takzir tidak bertujuan untuk hanya semata-mata menghukum pelaku jarimah, namun ada tujuan lain. Tujuan pemberlakuan sanksi takzir diantaranya adalah :

- 1) Preventif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- 2) Represif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga pelaku jera sehingga tidak mengulangi melakukan jarimah tersebut.
- 3) Kuratif, yakni sanksi takzir bertujuan untuk membawa perbaikan sikap bagi pelaku agar pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.
- 4) Edukatif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ukuran sanksi jarimah takzir tidak diatur secara tegas dalam alquran maupun hadis, melainkan kewenangan dari penguasa, dalam hal ini pemerintah atau hakim. Dan seperti yang kita ketahui bahwa macam-macam sanksi jarimah takzir sangat

beragam.¹⁶

1) Sanksi yang berkaitan dengan badan dalam kategori sanksi ini, ada dua jenis sanksi yaitu sanksi mati dan sanksi cambuk.

a. Hukuman Mati menurut para fuqaha, hukuman mati dapat diterapkan pada pelaku jarimah takzir sebagai hukuman tertinggi, meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan yang ketat, yaitu : Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak berdampak dan membuat jera. Harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Dari dua syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebaga sanksi takzir diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat atau apabila sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh bagi pelaku tersebut.

b. Hukuman Cambuk adalah merupakan hukuman had, namun bisa dilaksanakan dalam hukuman takzir karena cambuk dikatakan efektif karena :

a) Dapat memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.

b) Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifat

Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar, Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Jadi sesudah di cambuk pelaku dapat bekerja kembali dan menghidupi keluarganya.

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, namun menurut ulama Malikiyah, sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Tujuan hukuman ini adalah memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku bukan menimbulkan cacat fisik.

a. Hukuman Penjara dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang berarti pencegahan atau penahanan. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman penjara yang terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamr, kesaksian palsu, dan lain-lain.

Hukuman pengasingan, hukuman pengasingan merupakan hukuman had yang diterapkan kepada pelaku perampokan, namun hukuman ini dapat diterapkan sebagai hukuman takzir. Hukuman pengasingan ini diterapkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk kepada masyarakat. Contohnya Nabi pernah mengasingkan orang yang berperilaku waria ke luar dari madinah, demikian pula Khafifah Umar bin Khatab pernah mengasingkan pelaku pemalsuan stempel baitul mal setelah dikenakan hukuman cambuk. Masa pengasingan ditentukan oleh hakim, namun menurut Imam Abu Hanifah lama pengasingan takzir ini bisa lebih dari satu tahun.

[illegible]

Hukuman takzir dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda, yaitu hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya denda kepada orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya atau mencuri kambing sebelum sampai penggembalanya. Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. syariat islam tidak menetapkan batas terendah dan tertinggi dari sanksi denda.¹⁷

[illegible]

Putri yang merupakan murid dari Samsul Huda datang kerumah Samsul Huda dengan alasan untuk berbelanja, tidak lama kemudian anak Mega Putri Aulia bersama saksi Devi Anggraeni Putri dan saat itu Samsul Huda menyuruh saksi Devi Anggraeni Putri untuk belanja sayuran dan bumbu masakan diwarung, sehingga anak Mega Putri Aulia disuruh untuk tetap tinggal dirumah Samsul Huda.

Kemudian setelah saksi Devi Anggraeni Putri pergi, Samsul Huda langsung menutup pintu rumah lalu Samsul Huda menarik tangan anak Mega Putri Aulia keruang tamu rumah Samsul Huda, pada saat itu anak Mega Putri Aulia melakukan pemberontakan namun karena anak Mega Putri Aulia merasa ketakutan, Samsul Huda langsung menggendong anak Mega Putri Aulia dan menidurkannya dilantai karpet, setelah itu Samsul Huda langsung menyingkap rok yang dipakai oleh anak Mega Putri Aulia, tidak lama kemudian Samsul Huda melepas celana dalamnya dan menindih anak Mega Putri Aulia, kemudian penis Samsul Huda yang sudah dalam keadaan menegang dimasukkan kedalam vagina anak Mega Putri Aulia, kemudian Samsul Huda memaju mundurkan pinggulnya hingga beberapa kali sehingga penis Samsul Huda keluar masuk dari vagina anak Mega Putri Aulia berusaha memberontak namun karena takut anak Mega Putri Aulia tidak berdaya dan sekitar 10 kali penis Samsul Huda keeluar masuk di vagina anak korban, kemudian Samsul Huda mengeluarkan spermanya dilantai.

Akibat dari perbuatan Samsul Huda S.Pdi terhadap anak Mega Putri Aulia mengalami rasa takut dan trauma, sebagaimana telah diuraikan dalam *Visum et Repertum* No. 353/1305/437.76/2016 atas nama Mega Putri Aulia tanggal 3 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan yang oleh dr. Achmadi, SP.OG pada rumah sakit umu Ibnu Sina kabupaten Gresik, dengan hasil pemeriksaan: alat kelamin dalam: tampak cairan keputihan, bibir besar dan bibir kecil dalam batas normal, selaput darah tampak robekan lamaarah jam dua, enam dan sembilan.

Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan surat dakwaan untuk Samsul Huda S.Pdi dengan dakwaan *alternatif* yang mana majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sudah diputusan oleh jaksa penuntut umum yang lebih mendekati pada perbuatan terdakwa.

- 1) Pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

[illegible]

Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan surat tuntutan untuk Samsul Huda S.Pdi dengan pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Joncto

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana³

D. Saksi-saksi

Saksi-saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan dan telah didengarkan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji, terdapat beberapa saksi yang memberatkan serta beberapa saksi yang meringankan diantaranya 1 orang saksi korban, 4 orang saksi yang menjadi anak didik dari saudara samsul huda yang menerima perlakuan pencabulan yang dilakukan oleh saudara samsul huda

²P-29, NO.REG.PERK:PDM-05/Gresik/Euh.2/01/2017, Kejaksaan Negeri Gresik

³P-42, NO.REG.PERK:PDM-05/Gresik/Euh.2/01/2017, Kejaksaan Negeri Gresik

1) Barang Bukti

- 1 (satu) buah celana training warna hitam
- 1 (satu) buah kaus warna merah muda
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah rok panjang motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange

2) Alat Bukti

- [illegible]

Hakim menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya
“dua alat bukti yang sah”

Dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (Beyond a reasonable doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar melakukannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan nasihat hukum terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal yang tidak tepat karena didalam persidangan tidak hanya saksi Mega Putri Aulia yang menerangkan telah disetubuhi oleh Terdakwa, juga ada keterangan saksi-saksi lainnya yaitu seperti saksi Devi, saksi Sulina, saksi Winda, dan saksi Anisa yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut juga mengalami perlakuan yang sama seperti saksi Mega Putri Aulia dimana Terdakwa

juga pernah memanggil saksi-saksi tersebut ke kelas yang kosong atau kerumah Terdakwa lalu meraba-raba tubuh saksi korban bahkan ada yang disuruh mengulum alat kelamin (penis) dan saksi-saksi tersebut mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi Mega dari cerita saksi Mega sendiri ketika saksi-saksi tersebut masih bersekolah di MI Tajul Huda.

Pertimbangan hakim, bahwa terhadap keterangan saksi Mega Putri Aulia dipersidangan yang menerangkan saksi Mega telah dipanggil oleh Terdakwa kerumah Terdakwa lalu disetubuhi diperkuat oleh hasil Visum Et Refertum No. 353/1305/437.76/2016 atas nama Mega Putri Aulia yang menerangkan pada korban ditemukan selaput darah tampak robekan lama arah jam dua, enam dan sembilan dan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan terhadap keterangan saksi korban Mega Putri Aulia tentang perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi Mega Putri Aulia oleh Terdakwa tidak pernah dibantah, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan petunjuk yang memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim.

Oleh karena itu hakim menimbang dalam perkara ini perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mega Putri Aulia dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi Mega tidak ingat lagi pada tahun 2013 di rumah Terdakwa di dekat

sekolah MI Tajul Huda dan diruang kelas MI Tajul Huda yang terletak di desa Sembung kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik, terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi Mega Putri Aulia dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Mega Putri Aulia sebanyak 20 kali, dimana awalnya pada tahun 2013, ketika saksi Mega masih duduk di kelas 5 MI Tajul Huda. Terdakwa pernah memanggil saksi Mega bersama dengan saksi Devi datang kerumah Terdakwa dengan alasan disuruh berbelanja, kemudian saksi Devi pergi untuk belanja sedangkan saksi Mega menunggu dirumah Terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa, setelah saksi Devi pergi Terdakwa menutup pintu lalu menarik tangan saksi Mega dan memeluk saksi Mega dari belakang, kemudian Terdakwa menidurkan saksi Mega diatas karpet lalu membuka celana dalam saksi Mega dan celana dalam Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menindih saksi Mega dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi Mega hingga Terdakwa mengeluarkan cairannya diatas karpet setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi Mega untuk mencuci piring lalu saksi Devi datang, dan saksi Mega pulang bersama dengan saksi Devi. Kemudian terjadi lagi ketika saksi Mega pulang sekolah Terdakwa memanggil saksi Mega untuk keruangan kelas VI bersama dengan saksi Riska namun karena Riska bertemu dengan Siti Zulaikha akhirnya saksi Mega datang sendiri, setelah sampai kelas saksi Mega disuruh duduk oleh Terdakwa sedang Terdakwa

Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali sampai 20 kali ketika saksi Mega masih duduk dikelas 5 sampai saksi Mega kelas 6 baik dirumah Terdakwa maupun disekolah ketika jam istirahat maupun ketika pulang sekolah.

Oleh karenanya unsur-unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka harus pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yang yang melanggar pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menyatakan Terdakwa Samsul Huda S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa:

- Dikembalikan kepada saksi korban Mega Putri Aulia

- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar 5000 (lima ribu rupiah).

BAB IV

**Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk Tentang Tindak Pidana Pencabulan
Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat**

Dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk Tentang Pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa saudara Samsul Huda S.Pdi. Terdakwa melakukan pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat terhadap anak didiknya yang bernama Anak Mega Putri Aulia dengan cara meraba, mencium, memasukkan alat kelamin, memaksa, dan disertai bujukan-bujukan agar korban anak Mega Putri Aulia mau menerima perlakuannya.

Terdapat 8 (delapan) orang saksi dalam perkara pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi empat hal, yaitu kepala

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tentang pencabulan yang dilakukan oleh seorang pendidik saudara Samsul Huda S.Pdi terhadap anak didiknya yakni anak Mega Putri Aulia, terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Unsur pertama yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (*persona imperabilis*) terhadap suatu peristiwa hukum atau subyek orang perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang bernama Samsul Huda S.Pd. telah diajukan sebagai terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari

¹ Chandra Et. Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

Selanjutnya unsur unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, dan tenaga kependidikan, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga terpenuhinya unsur alternatif tersebut dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi.

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang yang dikerasi, sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Ancaman kekerasan dapat berupa ancaman terhadap fisik, maupun berupa intimidasi (kekerasan fisikis) yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

- Korban adalah anak didik terdakwa yang pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah serta Ketua Yayasan di tempat korban menuntut ilmu
- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan sosial dalam masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat tentang peranan guru sebagai pengajar dan pendidik yang dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban.

- Dari beberapa uraian tersebut, penulis mempunyai pendapat setelah meninjau lebih dalam perkara ini dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak berpedoman pada asas legalitas dengan yang bertujuan untuk di perolehnya suatu keadilan agar tidak merumuskan suatu perkara yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya seperti rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa*) dan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta*) dengan tidak menjadikan pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35

[illegible]

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat 3 unsur, yakni:²

1. *Al-rukn al-syari'* (unsur formil)
2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil)y
3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

Dalam perkara ini, seseorang terdakwa yang bernama Samsul Huda terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 81 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu

[illegible]

Oleh karena unsur hukum pidana Islamnya telah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili, pencabulan masuk pada tindak pidana atas kehormatan,

[illegible]

ukuran sanksi *tâ'zir* ini bergantung pada *ijtihad ulil amri* atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan Undang-undang

Mengenai hukuman *jarimah tâ'zir* yang diterapkan pada pelaku, menurut A. Hanafi dalam kasus *jarimah tâ'zir* yang berkaitan dengan hak adami. Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan *qisâs*, baik dengan ganti *diyât* atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *tâ'zir* bukan hukuman hudud.

Maka hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni *tâ'zir* yang dalam hal ini adalah yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

PENUTUP

Dari beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 60

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas *legalitas* dan asas *lex specialis derogate lex generalis*.
2. Untuk para guru, anak dan masyarakat, diharapkan agar meningkatkan rasa kasih sayang didalam ranah masyarakat apapun, saling menjaga dan saling melindungi. Terutama kepada anak-anak yang harus kita lindungi kehipunnya demi menjadi bangsa yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011)
- Chandra Et. Al, *Modul Mata KuliahEksaminasi*, (Yogyakarta: FakultasHukumUniversitasAtmaja, 2004)
- Data ditulismelalui website PengadilanNegeriGresik. <http://www.pn.gresik.go.id/index.php/menu-link/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, tanggal 03 September 2015 03:08 WIB)
- DjubaedahNeng, *PerzinaandalamPeraturanPerundang-undang di Indonesia ditinjaudariHukum Islam*, (Jakarta: KencanaPrenada Group, 2010)
- Faishol Dimas Ghanis, “*AnalisisHukumPidana Islam TerhadapHukumanBagiPelakuTindakPidanaPencabulanSebabPenyakitEksibisionisme (StudiPutusanNomor:86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)*”, (Skripsi---UIN SunanAmpel Surabaya, Surabaya, 2017)
- Hanafi Ahmad, *Asas-asasHukumPidana Islam* (Jakarta: BulanBintang, 1967)
- LouwismMa’luf, *Al-Munjid*(Beirut: Dār Al-Fikr,1954)
- Lumintang, *KejahatanTerhadapHartaKekayaan*(Jakarta: SinarGrafika, 2009)
- *Dasar-dasarHukumPidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997)
- Musahab, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002*”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013)
- M. Irfan, *HukumPidana Islam*, (Jakarta :Amzah, 2006)
- P-29, NO.REG.PERK:PDM-05/Gresik/Euh.2/01/2017, KejaksaanNegeri Gresik
- P-42, NO.REG.PERK:PDM-05/Gresik/Euh.2/01/2017, KejaksaanNegeri Gresik
- Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006)
- HadariNawawi, *MetodePenelitianBidangSosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991)
- Qadir Abdul audah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami* cet. Ke 11 jilidke 2 (Beirut: Mu’assasah arisalah, 1992)
- Syarifin,Pipin*HukumPidana di Indonesia*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2000)
- Purbayanti Azalia Sabana, “*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana N Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda)*”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta:Balai Pustaka,2005), 1035.
- Said M., *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987),
- Soesilo, *KitabUndang-undangHukumPidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: POLITEIA, 1991), 212.

